

**Hegemoni Pemangku Kebijakan Bupati Jember Terhadap  
Media Massa Lokal  
(Analisis Wacana Kritis Terhadap Kebijakan Redaksi JTV  
Jember)**

**Nila Noer Karisna**  
*Komunikasi dan Penyiaran Islam Pascasarjana IAIN Jember*  
*nilarisna40@gmail.com*

*Diunggah 10 Maret / Direvisi 15 Mei / Diterima 12 Juni 2020*

---

**Abstrac:** *The mass media which has developed rapidly provides the opportunities for all circles in using and taking the advantage of media for specific purposes, especially for political actors. For example in JTV Jember, one of the media in Jember Regency which reports a local political actor in Jember or the Regent of Jember, positive news that is displayed on JTV Jember has an effect on society. So that the news about the Regent which is negative will not be published because of the collaboration between the Regent of Jember and the media JTV Jember.*

*This study is qualitative with Cresswell's descriptive type of research using purposive subject selection method. The data collection techniques through observation, interviews and documentation. In analyzing the data, the writer uses data reduction, data presentation, and verification.*

*The results of this study reveal that the hegemony carried out by the Regent of Jember towards media JTV Jember is integral or total hegemony because it spontaneously agrees to the provisions of the MOU with the Regent. Further, media JTV Jember does not have freely in reporting the news about the Regent that contains of conflict. In addition, the editorial policy of JTV Jember after being analyzed through text which contains of news representations of JTV Jember becomes a representative in conveying the informations about the Regent of Jember, the relationship between JTV Jember news about the Regent of Jember is motivated by MOU. therefor, the identity of JTV Jember becomes a medium which is known by FaidaTV.*

**Kata Kunci:** *Hegemony of the Regent of Jember, Critical Discourse Analysis, JTV JEMBER Editorial Policy*

Korespondensi: **Nila Noer Karisna**  
IAIN Jember  
nilarisna40@gmail.com

## **A. PENDAHULUAN**

Fenomena saat ini antara media dengan massa berlatar belakang karena kepentingan pasar atau biasa disebut dengan berita yang sedang dinikmati oleh khalayak sedangkan massa sangat erat bubungannya dengan para penguasa karena pada hakikatnya penguasa membutuhkan massa untuk mendukung tujuan-tujuannya sehingga komunitas elit atau penguasa menggunakan media untuk kepentingan politik dan kepentingan media massa dengan komunitas elit atau penguasa berlatar belakang ekonomi karena pada hakikatnya media adalah industri yang juga erat kaitannya dengan ekonomi atau kemakmuran media tersebut.<sup>1</sup> Keberadaan media massa, mampu mengukuhkan sebuah wacana tertentu, membentuk sebuah konstruk diskurtif dan juga turut menawarkan prespektif dalam memandang sebuah fenomena, demi melindungi kepentingan kelas tertentu melalui dominasi informasi, Gramsci menyebutnya dengan istilah “hegemoni”. Kemampuan media dalam membentuk konsensus melalui dominasi informasi, membuat pembacanya kekurangan basis konseptual, sehingga sulit untuk memahami realitas sosial secara objektif.<sup>2</sup>

Hal ini tidak jauh beda dengan media lokal yang ada di Jember. Ada beberapa media elektronik stasiun televisi yang ada di kabupaten Jember yaitu, JTV Jember, Jember1tv, KompasTV Jember, KJTV Jember, Sbc Tv Jatim, Jawa Pos TV, dan SSTV Jember. Penulis sengaja memilih media elektronik televisi karena menurut penulis dengan media elektronik media televisi pemberitaan lebih meyakinkan penonton karena dilengkapi dengan tayangan dan masyarakat Jember juga lebih dominan menonton televisi.<sup>3</sup>

Dari keseluruhan media lokal Jember yang telah disebutkan ada beberapa yang menjalin kerjasama dengan pemerintah kabupaten Jember salah satunya media JTV Jember. Kerjasama antara JTV Jember dengan Bupati Jember sudah terjalin sejak Bupati Faida menjabat di Kabupaten Jember. Dengan adanya kerjasama ini setiap kegiatan Bupati yang berbaur positif harus diliput oleh JTV Jember yang sudah terjadwal. Berita yang berbayar biasanya ditayangkan dalam bentuk Advertorial atau bentuk periklanan yang disajikan dalam bahasa jurnalistik. Dalam satu bulan

---

<sup>1</sup> Catatan Dr.Kun Wazis Mi.kom, Kaprodi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Jember 15 November.

<sup>2</sup> Ahmad fathur Pahlefi Jurnal Hegemoni Harian Fajar Menjelang Pilpres 2019 (Studi analisis wacana kritis Nourman Fairlogh) Vol 143. [www.journal.uin.alauddin.ac.id](http://www.journal.uin.alauddin.ac.id)

<sup>3</sup> Observasi peneliti 19 september 2019.

Bupati Jember mentarget 15 berita advertorial yang ditayangkan setiap hari secara bergantian dengan durasi yang sudah ditentukan. Dengan berita advertorial maka sudah dapat diketahui bahwa berita tersebut merupakan berita berbayar sehingga JTV Jember setiap bulan mendapatkan omset dari Bupati Jember sesuai dengan ketentuan dan harga berita. Akan tetapi tidak sedikit juga berita yang berlabel advertorial juga dimasukkan atau dimuat dan ditayangkan dalam Berita Tapal Kuda yang tidak berbayar sehingga pemirsa tidak menyadari bahwa berita tersebut adalah bentuk kerjasama antara JTV Jember dengan Bupati Jember. Berita yang mengandung citra positif tentang Bupati Jember membuat masyarakat menjadi terkendali tanpa adanya konflik yang ditampilkan media karena media lokal telah dikuasai oleh Bupati Jember sehingga Jember terkesan aman terkendali.<sup>4</sup>

JTV Jember menjalin kerjasama dengan pemerintah kabupaten Jember atau bupati Jember dalam menghegemoni masyarakat agar terpengaruh dan dapat terkendali sehingga apabila ada pemberitaan tentang Bupati Jember atau Bu Dokter Faida dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin terdapat suatu kesalahan atau kekurangan maka media melakukan netralitas yang menyebabkan berita fakta menjadi realita yang sudah dikonstruksi.<sup>5</sup> Dengan adanya kerjasama antara penguasa suatu daerah atau pemangku kebijakan dengan media maka masyarakat dapat terkendali sehingga jauh dengan terjadinya konflik. Namun, banyak sekali fakta-fakta yang sengaja tidak dieksplor oleh pemangku kebijakan di media tersebut karena dengan alasan dapat menimbulkan pencemaran nama baik yang berujung putusnya kerjasama antara media dengan pelaku politik sehingga media terikat oleh suatu perjanjian dengan penguasa untuk tidak menayangkan hal negatif tentang dirinya.<sup>6</sup>

Dalam hal ini media tidak lagi bebas seperti yang ada dalam undang-undang pers. Secara tidak langsung media sudah terhegemoni oleh penguasa atau Bupati Jember dalam pemberitaan.<sup>7</sup>

Dari fenomena di atas peneliti berniat untuk mendalami lebih lanjut dan menganalisa sejauh mana media JTV Jember oleh hegemoni pemangku kebijakan atau Bupati Jember. Apakah fenomena tersebut merupakan salah satu strategi

---

<sup>4</sup> Observasi peneliti 3 desember 2019.

<sup>5</sup> Observasi peneliti 14 januari 2019.

<sup>6</sup> Wawancara dengan direktur JTV Jember 2019.

<sup>7</sup> Observasi peneliti. 2019

politik yang harus dilakukan oleh penguasa Dan bagaimana analisa media massa terhadap hegemoni yang dilakukan pemangku kebijakan atau Bupati Jember.

## **B. PEMBAHASAN**

### **Diskusi**

Fokus penelitian ini adalah berkaitan dengan bagaimana analisis media JTV Jember terhadap hegemoni pemangku kebijakan lokal Bupati Jember. Berdasarkan fokus tersebut, tulisan ini memiliki rumusan masalah:

1. Bagaimana hegemoni pemangku kebijakan Bupati Jember terhadap kebijakan redaksi media JTV Jember?
2. Bagaimana analisis wacana redaksi JTV Jember dalam menghadapi hegemoni pemangku kebijakan Bupati Jember?

### **Tujuan Penelitian**

1. Mendiskripsikan bagaimana hegemoni pemangku kebijakan Bupati Jember terhadap kebijakan redaksi media JTV Jember
2. Mendiskripsikan analisis wacana redaksi JTV Jember dalam menghadapi hegemoni pemangku kebijakan Bupati Jember.

### **Kerangka Teori**

#### 1) Teori Hegemoni

Teori hegemoni milik Gramsci mendefinisikan sebagai kepemimpinan budaya yang dilaksanakan oleh kelas yang berkuasa.<sup>8</sup> Topik mengenai hegemoni media memang selalu menarik untuk diperbincangkan, terutama berkaitan dengan atas penguasaan arus informasi oleh segelintir orang yang menguasai media massa. Dalam penggunaan ruang publik, muncul ketidakseimbangan yang berkonsekuensi pada siapa mengatur siapa. Mereka yang berkuasa akan menentukan apa yang harus dipikirkan dan dikerjakan oleh masyarakat, yang wujudnya akan nampak dalam perilaku budaya.<sup>9</sup> Hegemoni juga dapat timbul saat kerjasama terjalin antara kelompok penguasa dengan media. Seperti yang

---

<sup>8</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012), 476.

<sup>9</sup> Altheide, *Media Hegemony: A Failure of Perspective*, (Public Opinion Quarterly, Summer, 1984) , hal. 477.

dikemukakan Roger Simon menyatakan, “hegemoni bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Atau bahasa sederhananya, hegemoni adalah sesuatu organisasi consensus”.<sup>10</sup>

Jenis hegemoni menurut teori Gramsci hegemoni mempunyai tiga tingkatan yaitu, hegemoni total (*integral*), hegemoni merosot (*decadent*), dan hegemoni yang minimum. Ketiga tingkatan hegemoni ini antara lain: Pertama, hegemoni total (*integral*). Hegemoni *integral* ditandai dengan afiliasi massa yang mendekati totalitas. Masyarakat menunjukkan tingkat kesatuan moral dan intelektual yang kokoh. Ini tampak dalam hubungan organis antara pemerintah dan yang diperintah. Hubungan tersebut tidak diliputi dengan kontradiksi dan antagonisme, baik secara sosial maupun etis.<sup>11</sup> Kedua, hegemoni yang merosot (*decadent hegemony*). Dalam masyarakat kapitalis modern, dominasi ekonomis borjuis menghadapi tantangan berat yang menunjukkan adanya potensi disintegrasi. Dengan sifat potensial ini dimaksudkan bahwa disintegrasi itu tampak dalam konflik yang tersembunyi “dibawah permukaan kenyataan sosial”. Artinya, sekalipun sistem yang ada telah mencapai kebutuhan atau sarannya, namun “mentalitas” massa tidak sungguh-sungguh selaras dengan pemikiran yang dominan dari subjek hegemoni. Karena itu, integrasi budaya maupun politik mudah runtuh. Situasi demikianlah yang disebut *decadent hegemony*. Ketiga, hegemoni minimum (*minimal hegemony*). Bentuk ketiga ini merupakan bentuk hegemoni yang paling rendah dibanding dua bentuk di atas. Hegemoni bersandar pada kesatuan ideologis antara elit ekonomis, politis, dan intelektual yang berlangsung bersamaan dengan keengganan setiap campur tangan massa dalam hidup bernegara. Dengan demikian, kelompok-kelompok hegemonis tidak mau menyesuaikan kepentingan dan aspirasi-aspirasi mereka dengan kelas lain dalam masyarakat. Mereka malah mempertahankan peraturan melalui transformasi penyatuan para pemimpin budaya, politik, sosial, maupun ekonomi yang secara potensial bertentangan dengan “negara baru” yang dicita-citakan

---

<sup>10</sup> Roger Simon, Gagasan-gagasan Politik Gramsci, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan Insist, 1999), Hal. 19-20

<sup>11</sup> Antonio Gramsci, Negara dan Hegemoni, Nezar Patria dan Andi Arief, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2003) 161-163

oleh kelompok hegemonis itu.<sup>12</sup> Adanya kerjasama yang bertujuan untuk sama-sama menghasilkan sehingga hegemoni terbentuk dan spontan disetujui karena adanya hasil yang didapat.

## 2) Teori Analisis Wacana Kritis

Teori analisis wacana yang disampaikan Nourman Fairlough Menurut paham analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis*), teks bukanlah sesuatu yang bebas nilai dan menggambarkan realitas sebagaimana adanya. Kecenderungan pribadi dari sang produsen teks dan struktur sosial yang melingkupi sang produsen teks ikut mewarnai isi teks. Bahasa tidak netral melainkan membawa pesan ideologi tertentu yang dipengaruhi oleh sang pembuat teks. AWK memahami wacana tidak semata-mata sebagai suatu studi bahasa, tetapi AWK juga menghubungkannya dengan konteks. Konteks yang dimaksud adalah konteks praktik kekuasaan yang bertujuan untuk memarginalkan individu atau kelompok tertentu.<sup>13</sup> Konsep analisis wacana kritis yang diungkapkan Fairlough ada 3 konsep yakni:

*Pertama*, setiap teks secara bersamaan memiliki tiga fungsi, yaitu representasi, relasi, dan identitas. Kedua, praktik wacana meliputi cara-cara para pekerja media memproduksi teks. Hal ini berkaitan dengan wartawan itu sendiri selaku pribadi sifat jaringan kerja wartawan dengan sesama pekerja media lainnya, pola kerja media sebagai institusi, seperti cara meliput berita, menulis berita, sampai menjadi berita di dalam media. Ketiga, praktik sosial-budaya menganalisis tiga hal yaitu ekonomi, politik (khususnya berkaitan dengan isu-isu kekuasaan dan ideologi) dan budaya (khususnya berkaitan dengan nilai dan identitas) yang juga mempengaruhi institusi media dan wacananya. Pembahasan praktik sosial budaya meliputi tiga level, yaitu: level situasional, institusional, dan sosial. Level situasional berkaitan dengan produksi dan konteks situasinya. Level institusional berkaitan dengan pengaruh institusi secara internal maupun eksternal. Level sosial berkaitan dengan situasi yang lebih makro, seperti sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem budaya masyarakat secara keseluruhan.<sup>14</sup><sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Antonio Gramsci, Negara dan Hegemoni, Nezar Patria, 161-163.

<sup>13</sup> Umar Fauzan, Jurnal Analisis Kritis Dari Model Fairlough Hingga Mills, Samarinda 2014, Vol 6

<sup>14</sup> Umar Fauzan, Jurnal Analisis Kritis Dari Model Fairlough Hingga Mills, , , , ,

## **Metodologi**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif oleh Creswell didefinisikan sebagai berikut. *“Qualitative research focuses on the process that is occurring as well as the product or outcome. Researchers are particularly interested in understanding how things occurs.”*<sup>15</sup> Definisi oleh Creswell menerangkan bahwa penelitian kualitatif difokuskan pada proses yang terjadi dalam penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian kuantitatif tidak dapat dibatasi. Disamping itu, peneliti merupakan bagian yang penting dalam penelitian untuk memahami gejala sosial terjadi dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memilih pendekatan ini karena ingin mendalami secara detail, analisis media terhadap hegemoni pemangku kebijakan yang ada di Jember. Pendekatan kualitatif disebut juga sebagai *Interpretive approach*. Seperti dikutip diutarakan oleh Neuman. *“In general, the interpretive approach is the systemic analysis of socially meaningful action through the direct detailed observations of people in natural settings in order to arrive at understandings and interpretations of how people create and maintain their social people definition of it. A person definition of a situation tells him or her how to assign meaning in constantly shifting condition.”*<sup>16</sup>

Penulis dalam pendekatan ini tidak bebas nilai, yang dapat dipengaruhi oleh subjektivitas penulis. *“Interpretive research does not try to be value free. This is because interpretive research sees values and meaning infused everywhere in everything.”*<sup>17</sup> Penulis dalam menginterpretasikan gejala sosial yang muncul dan berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan perpajakan atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dipengaruhi situasi, kondisi serta waktu penelitian. Situasi, kondisi serta waktu penelitian tersebut akan mempengaruhi dan dipengaruhi subjektivitas penulis. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Creswell mendefinisikan penelitian deskriptif sebagai *“Qualitative research is descriptive in that the researcher is interested in process, meaning, and understanding gained through words or pictures”*.<sup>18</sup> Penelitian dalam definisi ini adalah bahwa peneliti haruslah tertarik pada proses, pemaknaan dan pemahaman yang kemudian

---

<sup>15</sup> John W. Creswell, *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches* (California: SAGE Publications, Inc, 1994), hal. 162.

<sup>16</sup> W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (New York: Pearson Education, 2003), hal. 76.

<sup>17</sup> W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods*: 80.

<sup>18</sup> John. W. Creswell....., 145

dijabarkan dalam bentuk kata dan gambar. Pihak-pihak yang hendak dijadikan informan (subjek) dipilih dengan menggunakan metode purposive. Dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi pengamatan secara aktif dan penuh (*Total Participant Observatioan*).<sup>19</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisa data deskriptif kualitatif. Analisa data dimulai dengan menyusun sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami diri sendiri maupun orang lain.<sup>20</sup>

Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*) dan Verifikasi (*conclusion Drawing*).<sup>21</sup>

Metodologi penelitian menjelaskan tentang: pendekatan, ruang lingkup atau objek, definisi operasional di setiap variabel / deskripsi fokus penelitian, tempat, populasi dan sampel / informan, sumber dan alat utama, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

## **Temuan dan Diskusi**

1. Hegemoni pemangku kebijakan Bupati Jember terhadap kebijakan redaksi media JTV Jember.

Kaitan teori hegemoni dengan hegemoni yang dilakukan Bupati Jember terhadap JTV Jember yang muncul karena adanya kerjasama. Kerjasama atau MOU yang dijalin antara JTV Jember dengan Bupati jember terjalin sejak lama. Kerjasama tersebut secara tidak langsung menyetujui ketentuan-ketentuan baik tertulis maupun non tertulis salah satunya yakni saling menjaga nama baik dengan sikap menjalin nama baik tersebut maka kerjasama dapat terjalin baik

---

<sup>19</sup> Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif (Jakarta : Lkis, 2008), 115

<sup>20</sup> Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), 244.

<sup>21</sup> Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif 253.

dalam jangka waktu yang lama.<sup>22</sup> Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Biro JTV Jember yang menjelaskan bahwa kerjasama antara JTV Jember dengan Bu Faida atau Bupati Jember terjalin sejak lama bahkan sebelum Bu Faida menjabat sebagai Bupati Jember. Persetujuan MOU antara media dengan

Bupati Jember menyesuaikan kebutuhan dari Pemkab Jember. Menurut Kabag Humas Pemkab Jember setiap kerjasama yang ditawarkan oleh media ke Pemkab Jember harus mentaati persetujuan Bupati Jember melalui ngedes istilah ini diartikan sebagai pembahasan Bupati Jember terkait perjanjian MOU dengan media yang berisikan berita apa yang ditayangkan dan berapa berita yang dibutuhkan oleh Pemkab Jember juga dibahas tentang nominal atau nilai yang dibayarkan kepada media termasuk kepada JTV Jember.<sup>23</sup>

Dalam perjanjian MOU yang ditawarkan oleh JTV Jember berupa berita advertorial atau berita berbayar hal ini tidak jauh beda dengan iklan namun dikemas dalam berita. 20 berita ditawarkan namun yang di ACC atau disetujui oleh Bupati Jember 15 berita yang menyangkut tentang pemberitaan realisasi 22 janji kerja Bupati Jember. Selain advertorial, Bupati juga menyetujui adanya tawaran berita dalam bentuk *feature* berita yang durasinya bisa satu jam. Menurut salah satu staf Humas Pemkab Jember biasanya Bupati menyetujui adanya tawaran berita bentuk *feature* namun Bupati Jember lebih menginginkan berita *feature* berisikan tentang pelayanan publik. 25 Kerjasama tersebut tentunya juga memiliki tujuan-tujuan tertentu. Ada dua tujuan dari JTV Jember dalam menjalin kerjasama dengan Bupati Jember yakni tujuan internal dan eksternal. Tujuan internal adalah Biro disetiap daerah dipastikan tidak lepas dari iklan daerah termasuk iklan dari Pemkab bahkan menurut Kepala Biro JTV Jember iklan dari Pemkab termasuk iklan paling besar di dalam daerah. Tujuan yang kedua dari tujuan eksternal yaitu setiap daerah atau kota selalu memerlukan media karena untuk publikasi kinerja dan menyampaikan pesan kepada masyarakat agar lebih mudah dengan sinergitas tersebut setiap daerah memiliki anggaran tersendiri untuk MOU dengan media baik lokal maupun nasional. Sehingga JTV Jember yang merupakan televisi lokal mencakup wilayah Jember dan Bondowoso menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dalam

---

<sup>22</sup> Observasi JTV Jember 15 Oktober 2019

<sup>23</sup> Observasi Pemkab Jember 30 Januari 2020

jangka waktu lama. Iklan dari Pemkab Jember yang berselang selama satu tahun dan bisa diperpanjang membuat JTV Jember memanfaatkan kesempatan sebagai media massa lokal karena iklan dari Pemkab Jember selain menghasilkan omset dengan jumlah banyak iklan Pemkab Jember juga dapat diperpanjang setiap massa kontrak habis.<sup>24</sup>

Sedangkan tujuan dari Pemkab Jember bekerjasama dengan JTV Jember adalah untuk untuk menyampaikan dan mempublikasikan program-program kegiatan Pemkab Jember dan juga sebagai penyeimbang dari berita-berita yang bersifat negatif atau mengandung konflik dengan Pemkab jember. Dari pernyataan tersebut dapat kita analisis bahwa kekuatan penguasa menjadi suatu keuntungan bagi media jika menjalin kerjasama yang memiliki tujuan tujuan tertentu baik dari internal maupun dari eksternal.<sup>25</sup>

Namun tujuan yang sebenarnya dari JTV Jember menjalin kerjasama dengan Bupati Jember tidak lain adalah untuk kepentingan bisnis atau iklan. Karena menurut kepala Biro JTV Jember kerjasama dengan Bupati jember merupakan iklan terbesar dalam daerah. Media yang notabennya adalah industri memerlukan iklan untuk kelangsungan produksi media tersebut. Sehingga JTV jember berusaha memberikan yang terbaik untuk kerjasama tersebut.<sup>26</sup> Menurut humas Pemkab Jember fungsi dari kerjasama antara Bupati Jember dengan JTV Jember untuk *memback-up* pemberitaan Pemkab Jember, memberikan klarifikasi apabila terdapat berita yang bersifat negatif, dan juga menginformasikan kepada masyarakat tentang program kerja Pemkab Jember terutama Bupati Jember. Dengan adanya tujuan dari masing-masing pihak dan fungsi tersebut kerjasama yang dijalin antara Bupati Jember dengan media JTV Jember juga memiliki hasil manfaat bagi JTV Jember yaitu berupa omset yang didapatkan JTV Jember dalam jumlah besar.<sup>27</sup> Oleh karena itu media massa merupakan alat utama yang mampu menciptakan persetujuan spontan. Selain tujuan dan manfaat dari kerjasama yang dijalin Bupati Jember dengan JTV Jember ada beberapa aturan dalam kerjasama atau MOU tersebut. Peraturan tersebut disetujui oleh kedua belah

---

<sup>24</sup> Observasi JTV jember 20 Januari 2020

<sup>25</sup> Observasi JTV jember 20 Januari 2020

<sup>26</sup> Observasi JTV jember 24 Januari 2020

<sup>27</sup> Observasi Pemkab Jember 2 febuari 2020

pihak.<sup>28</sup> Menyetujui peraturan tersebut sebagaimana persetujuan peraturaturan yang menyangkut tentang pemberitaan Bupati Jember di JTV Jember yang memuat tentang kegiatan Bupati dalam merealisasikan 22 janji kerja. Berita tersebut dikemas dalam *advertorial*, sedangkan *Advertorial* merupakan berita bentuk periklanan yang disajikan dengan gaya bahasa jurnalistik *Advertorial* berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris *Advertising* dan *Editorial Periklanan (advertising)* adalah penyajian materi secara persuasif kepada publik melalui media massa dengan tujuan untuk mempromosikan barang atau jasa. *Editorial* adalah pernyataan tentang opini yang merupakan sikap resmi dari redaksi. Selain bentuk berita *advertorial* JTV Jember juga menayangkan berita tentang Bupati berbentuk *feature*. Berita *feature* merupakan berita yang awet, tidak akan basi, tetap aktual karena menggabungkan fakta, opini, dan gaya bahasa sastra. *Feature* secara bahasa dapat diartikan sebagai kata benda yang bermakna memiliki keistimewaan dan juga diartikan sebagai kata kerja yang bermakna mengutamakan dan menonjolkan. Pihak humas Pemkab Jember juga membenarkan bahwa kerjasama antara JTV Jember dengan Bupati Jember menayangkan berita *feature*. Namun, berita ini tidak setiap bulan tayang karena sesuai dengan penawaran yang diajukan oleh media JTV Jember sendiri. Berita 15 kali *advertorial* mengenai Bupati juga dibenarkan oleh salah satu reporter yang melakukan liputan. Dan jika ada isu yang menarik reporter bisa melakukan liputan lebih dari target.<sup>29</sup> Dari pemberitaan tersebut dapat diartikan bahwa JTV Jember dan Bupati Jember menyetujui peraturan tersebut, namun JTV Jember juga memiliki komitmen dalam pemberitaan mengenai Bupati Jember. Menurut Kabiro JTV Jember tayangan mengenai berita Bupati yang menyangkut hal negatif tidak serta merta langsung ditayangkan karena untuk menjaga MOU agar tetap terjalin dengan baik.<sup>30</sup>

Tayang yang menyangkut berita tentang Bupati Jember dalam pemberitaan *advertorial* ataupun *feature* dan berita Tapalkuda di JTV Jember memberikan efek dan timbal balik dari pemirsa ataupun dari pengamat media sehingga JTV Jember dijuluki dengan Faida TV karena kerjasama yang dijalin dengan JTV Jember membuat tayangan JTV Jember sering menayangkan berita

---

<sup>28</sup> Observasi JTV Jember 3 febuari 2020

<sup>29</sup> Observasi JTV Jember 4 Febuari 2020

<sup>30</sup> Observasi JTV Jember 4 Febuari 2020

tentang Bupati Jember. Hal ini dapat dianalisis bahwa Bupati Jember dapat dikatakan sebagai pemilik media karena dengan adanya kerjasama tersebut yang dapat membayar media untuk pemberitaan Bupati Jember sehingga hegemoni Bupati Jember terhadap media JTV Jember melalui MOU tersebut menjadikan JTV Jember mendapat julukan FaidaTV.<sup>31</sup>

Dengan terjalinnya kerjasama yang baik maka hasil yang didapat oleh JTV Jember berupa materil atau omset dapat mengalir lancar maka dengan hasil ini hegemoni dapat dilihat atau dikategorikan jenis hegemoni yang dilakukan Bupati terhadap JTV Jember adalah jenis hegemoni total karena melihat dari pemerintah dengan yang di perintah memiliki kesatuan moral intelektual seperti hubungan kerjasama antara Bupati Jember dengan JTV Jember yang memiliki kesatuan moral intelektual dalam pemberitaan. Apalagi Untuk mensingkronkan kerjasama dalam pemberitaan di media, Pemkab Jember menjalin komunikasi yang baik dengan media bahkan setiap hari diadakan kegiatan menyampaikan informasi ke media tentang kegiatan-kegiatan yang ada di Pemkab Jember khususnya kegiatan yang dihadiri oleh Bupati Jember dan pihak Pemkab Jember juga mengadakan kegiatan silaturahmi dengan media atau biasa disebut dengan sambung rasa. Untuk menjalin komunikasi yang baik dengan media massa Humas Pemkab sengaja membentuk formasi p1 dan p2 yang ditugaskan untuk menginformasikan kepada media-media tentang kegiatan Pemkab jember yang akan dijalankan terutama kegiatan yang dihari oleh Bupati jember.<sup>32</sup> Dengan adanya silaturahmi dengan media, Pemkab Jember dapat mengendalikan pemberitaan yang ditayangkan oleh media tersebut khususnya media yang bekerjasama dengan Pemkab Jember salah satunya yaitu JTV Jember. Karena dengan sambung rasa antara Pemkab dengan media maka akan dapat mengetahui apa saja yang akan dilakukan baik dari pihak Pemkab maupun dari media.<sup>33</sup>

Hegemoni yang dilakukan Bupati Jember terhadap JTV Jember termasuk bentuk hegemoni integral atau total. Seperti teori yang dikemukakan Gramsci yakni Hegemoni integral ditandai dengan afiliasi massa yang mendekati totalitas. Masyarakat menunjukkan tingkat kesatuan moral dan intelektual yang kokoh. Ini tampak dalam hubungan organis antara pemerintah dan yang

---

<sup>31</sup> Observasi JTV Jember 10 Febuari 2020

<sup>32</sup> Observasi Pemkab Jember 8 febuari 2020

<sup>33</sup> Observasi Pemkab Jember 19 Desember 2019

diperintah. Hubungan tersebut tidak diliputi dengan kontradiksi dan antagonisme, baik secara sosial maupun etis.<sup>34</sup> Sehingga sudah jelas bahwa secara tidak langsung JTV Jember terhegemoni oleh Bupati Jember secara total atau integral karena melihat dari pemerintah dengan yang di perintah memiliki kesatuan moral intelektual seperti hubungan kerjasama antara Bupati Jember dengan JTV Jember yang memiliki kesatuan moral intelektual dalam pemberitaan. adanya hasil yang didapat oleh JTV Jember membuat pemberitaan Bupati Jember gencar ditayangkan dan untuk berita yang mengandung konflik Bupati Jember selaku media yang menjalin MOU JTV Jember tidak selalu menayangkan berita yang memiliki unsur merugikan Bupati Jember.<sup>35</sup>

Teori Gramsci yang menjelaskan bahwa hegemoni adalah sebuah kontrol ide yang berusaha untuk merekrut kepatuhan. Asumsinya bahwa, kelas dominan perlu untuk menyusun apa yang disebut dengan “persetujuan spontan” dengan berbagai cara untuk membuat konsensus kepada masyarakat.<sup>36</sup> Oleh karena itu media massa merupakan alat utama yang mampu menciptakan persetujuan spontan. Menjadi relevan sebagaimana hegemoni yang dilakukan Pemkab Jember atau Bupati Jember terhadap media massa lokal.

Apalagi Untuk mensinkronkan kerjasama dalam pemberitaan dimedia, Pemkab Jember menjalin komunikasi yang baik dengan media bahkan setiap hari diadakan kegiatan menyampaikan informasi ke media tentang kegiatan-kegiatan yang ada di Pemkab Jember khususnya kegiatan yang dihadiri oleh Bupati Jember dan pihak Pemkab Jember juga mengadakan kegiatan silaturahmi dengan media atau biasa disebut dengan sambung rasa. Untuk menjalin komunikasi yang baik dengan media massa Humas Pemkab sengaja membentuk formasi p1 dan p2 yang ditugaskan untuk menginformasikan kepada media-media tentang kegiatan Pemkab Jember yang akan dijalankan terutama kegiatan yang dihadiri oleh Bupati Jember.<sup>37</sup>

Hegemoni dapat terjadi di JTV Jember karena adanya beberapa faktor yaitu ketergantungan penguasa kepada media untuk lebih mudah

---

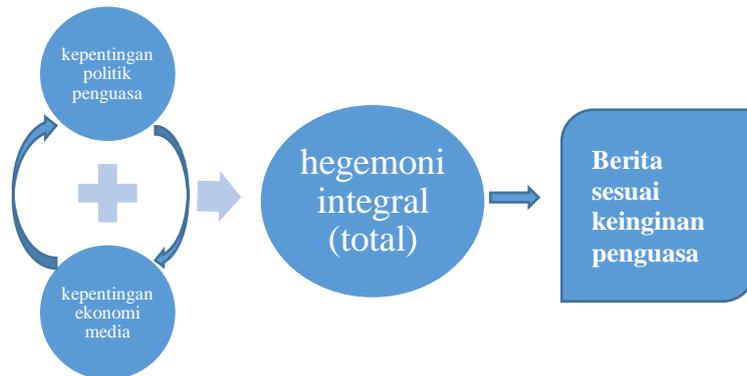
<sup>34</sup>Antonio Gramsci, *Negara dan Hegemoni, Nezar Patria dan Andi Arief*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2003) 161-163.

<sup>35</sup> Observasi JTV Jember 12 November 2019

<sup>36</sup> Ahmad fathur Pahlefi *Jurnal Hegemoni Harian Fajar Menjelang Pilpres 2019 (Studi analisis wacana kritis Nourman Fairlogh)* Vol 146.

<sup>37</sup> Observasi Pemkab Jember 8 febuari 2020

menyampaikan pesan dan media yang membutuhkan omset atau kepentingan ekonomidalam mensejahterakan industrinya.



**Gambar 4.4 faktor hegemoni**

Sumber diolah oleh peneliti

Dari gambar tersebut dapat dianalisis bahwa proses dari adanya kepentingan politik penguasa yang bekerjasama dengan media yang memiliki kepentingan ekonomi melalui negosiasi MOU sehingga terjadilah hegemoni yang secara spontan tak disadari oleh pihak yang terhegemoni lalu dari proses tersebut lahir sebuah berita yang sesuai dengan keinginan penguasa sehingga media tidak bisa dikatakan sebagai media independent.

## 2. Analisis wacana redaksi JTV Jember dalam menghadapi hegemoni pemangku kebijakan Bupati Jember

Hegemoni yang dilakukan Bupati jember terhadap JTV Jember membuat tim redaksi JTV jember membuat strategi dalam pemberitaan Bupati Jember baik dari liputan hingga ke dapur redaksi. proses dari pemberitaan untuk menyaring kembali berita-berita yang layak ditayangkan atau tak layak tayang. Hal ini berpatokan pada kebijakan redaksi yang telah dibangun oleh Kepala Biro JTV Jember untuk tidak menayangkan berita yang dapat merugikan pihak-pihak yang bekerjasama dengan JTV Jember agar MOU tetap berjalan aman dan lancar sehingga tetap menghasilkan omset yang memuaskan.<sup>38</sup>

Dalam bentuk kerjasama tersebut dapat berjalan lancar karena adanya sebuah tim yang kompak dalam menjalankan tujuan tersebut. Begitu juga dengan JTV Jember yang sedang menjalin MOU dengan Bupati Jember. Untuk memenuhi sinergitas tersebut ada tim yang menjalankan tugasnya masing-masing.

<sup>38</sup> Observasi JTV Jember 1 November 2019

Tim tersebut terdiri dari produser, reporter, wartawan, editor naskah, editor video dan operator MCR (orang yang menayangkan program yang telah tersusun serta menjaga kelancaran dari program tersebut). Dengan terbentuknya tim tersebut ada strategi yang diterapkan dalam hal pemberitaan tentang Bupati Jember yang telah bekerjasama dengan JTV Jember.<sup>39</sup>

Liputan yang dilakukan oleh reporter JTV Jember dalam pemberitaan Bupati Jember tidak selalu semuanya ditayangkan dalam pemberitaan. Berita tersebut masih diolah terlebih dahulu untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh sebab itu ada beberapa berita yang diliput bisa jadi tidak ditayangkan. Hal ini sengaja dilakukan untuk menghindari adanya kerusakan hubungan kerjasama yang sudah terjalin. Tidak hanya dari wartawan yang selalu berhati-hati dalam mengolah berita namun, para editor JTV Jember juga melakukan filter atau saringan terlebih dahulu mana yang layak ditayangkan mana yang tidak layak ditayangkan. Hal tersebut juga dilakukan karena bentuk kehati-hatian dalam menjaga MOU yang sudah terjalin agar tidak mengancam kerjasama tersebut.<sup>40</sup>

Berita tentang Pemkab Jember atau Bupati Jember dapat dianalisis bahwa pemberitaan JTV Jember tentang Bupati Jember memiliki batasan-batasan dan campur tangan dari Pemkab Jember yang notabennnya menjalin kerjasama dengan JTV Jember. Sehingga berita tentang Bupati Jember tergantung pada MOU yang sudah dijalin tersebut.<sup>41</sup>

Melalui teori analisis wacana kritis Nourman Fairlough ini bahwa berita yang dikonsumsi publik harus dilihat secara kritis sebagai bentuk penanaman ideologi tertentu yang diproduksi oleh JTV Jember. Konsep analisis wacana kritis yang diungkapkan Fairlough ada 3 konsep yakni:

- a. Teks memiliki tiga fungsi yang mengandung makna kuasa pemangku kepentingan dalam mengendalikan media dan membentuk citra positif dimasyarakat sehingga berita yang ditayang media JTV Jember dalam mengolah berita tersebut berupa:
  - 1) Representasi yakni mewakili dari pesan informasi Pemkab Jember kepada masyarakat dan Bupati Jember dalam memimpin masyarakat Jember agar

---

<sup>39</sup> Observasi JTV Jember 2 November 2019

<sup>40</sup> Observasi JTV Jember 8 November 2019

<sup>41</sup> Observasi JTV Jember 8 November 2019

masyarakat Jember percaya terhadap kinerja Pemkab Jember dan masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam mensukseskan program-program yang dicanangkan Pemkab Jember.

- 2) Relasi yakni teks yang diolah oleh media JTV Jember dalam pemberitaan Bupati Jember hubungan antara teks yang diproduksi JTV Jember dengan MOU yang dijalin bersama Bupati Jember. Sehingga dengan fungsi relasi ini dapat dilihat bahwa teks yang diproduksi oleh tim JTV Jember mengandung unsur menjaga nama baik Bupati Jember dan bahkan JTV Jember sangat berhati-hati dalam mengolah berita Bupati Jember. Berita-berita negatif yang muncul menjadikan JTV Jember sebagai penetralisir untuk memecah pandangan masyarakat terhadap Pemkab Jember. Seringnya JTV Jember dalam menayangkan berita Pemkab Jember atau Bupati Jember bahkan dijuluki dengan sebutan Faida TV tidak membuat JTV Jember berubah. Tanpa adanya MOU pun JTV Jember tetap rajin meliput, memproduksi dan menayangkan berita Bupati Jember. Sehingga hal tersebut terlihat jelas bahwa media JTV Jember menunjukkan berita atau tayangan yang memiliki unsur kuasa pemangku kepentingan.
  - 3) Ketiga yakni identitas, JTV Jember dijuluki dengan FaidaTV oleh beberapa oknum dengan alasan karena JTV Jember sering memuat dan menayangkan berita tentang Bupati Jember. Posisi media JTV Jember baik dari Kepala Biro, wartawan, reporter, tim editor menunjukkan keberpihakan terhadap Bupati Jember dalam mengolah berita yang ditayangkan JTV Jember. Melalui analisis wacana kristis Kepala Biro menjadi subyek aktif dalam mengendalikan produksi berita JTV Jember tentang Bupati Jember.
- b. Praktik wacana meliputi cara-cara para pekerja media memproduksi teks. JTV Jember dalam memproduksi teks yang menyangkut pemberitaan Bupati Jember tentu meliputi beberapa tahapan di dapur redaksi yakni mulai dari wartawan liputan lalu dikirim ke tim dapur redaksi dan diedit oleh tim editor lalu ditayangkan sesuai dengan perjanjian MOU penayangan. Namun, wartawan dalam liputan berita JTV Jember sangat berhati-hati. Reporter JTV Jember juga menyatakan bahwa pemberitaan Bupati Jember yang mengandung unsur negatif tetap diliput namun dengan sudut pandang yang

berbeda agar tidak ada pihak yang dirugikan. Pengolahan berita mengenai Bupati Jember di media JTV Jember mengikuti dengan kebijakan redaksi yang tidak tertulis namun, tim redaksi tertuntu toleh sebuah realitas media yang sedang bekerjasama dengan pihak Pemkab Jember atau Bupati Jember sehingga setiap pemberitaan Bupati Jember diolah tanpa merusak MOU tersebut meskipun berita tersebut menjadi kurang menarik atau bisa disebut dengan *news value*.<sup>42</sup>

Selama tahun 2019, berita mengenai Bupati Jember di JTV Jember tidak ditemukan peneliti mengenai berita yang mengandung unsur negatif tentang Bupati. Sehingga para pemirsa JTV Jember tidak sepenuhnya mendapat informasi atau berita negatif tentang Bupati Jember dalam memimpin Kabupaen Jember.<sup>43</sup>

Produksi berita JTV Jember yang menyangkut Bupati Jember tidak lepas dengan kepentingan ekonomi yang menjadi tujuan dalam MOU JTVJember dengan Bupati Jember. Kepala Biro JTV Jember menyatakan bahwa produksi JTV Jember tentang Bupati karena adanya MOU danang menjadi tujuan utama adalah bisnis.<sup>44</sup> Sebagian pemirsa JTV jember tidak menyadari bahwa yang ditonton ditayangkan JTV Jember memiliki unsur kepentingan penguasa dankepentingan ekonomi media. Sehingga JTV Jember tetap menayangkan berita Bupati Jember dengan batasan-batasan tertentu untuk tetap menjaga MOU yang sudah dijalin sejak lama.<sup>45</sup>

- c. Praktik sosial-budaya menganalisis tiga hal yaitu ekonomi, politik (khususnya berkaitan dengan isu-isu kekuasaan dan ideologi) dan budaya (khususnya berkaitan dengan nilai dan identitas) yang juga mempengaruhi institusi media dan wacananya.<sup>46</sup> Kerjasama yang dijalin JTV Jember dan Bupati Jember dalam pemberitaan Bupati Jember dapat dianalisis mulai dari segi ekonomi bahwa media notabennya adalah industri sehingga berita yang dimuat memiliki nilai ekonomi. Pengamat media menyatakan bahwa kerjasama antara media dengan penguasa menjadi hal biasa karena saat ini

---

<sup>42</sup> Observasi prariset JTV jember7 febuari 2019.

<sup>43</sup> Observasi prariset JTV jember19 Meret 2019.

<sup>44</sup> Observasi JTV jember21 Januari 2020.

<sup>45</sup> Observasi prariset jember 2019.

<sup>46</sup> Umar Fauzan, Jurnal Analisis Kritis Dari Model Fairlough Hingga Mills, Samarinda 2014, Vol 6.

media yang ingin eksis harus memiliki modal dalam produksi tersebut sehingga bukan kerjasama tersebut juga bisa memakmurkan media dan memudahkan penguasa dalam menyampaikan informasi. Namun, lain halnya apabila media tersebut saat sudah terjalin kerjasama atau MOU lalu melupakan independent media yang seharusnya diberitakan menjadi tidak ditayangkan hal tersebut menjadikan media tidak netral lagi dalam hal pemberitaan.<sup>47</sup>

Peneliti menganalisis bahwa berita JTV Jember yang menyangkut pemberitaan Bupati Jember memiliki unsur nilai ekonomi. Selain ekonomi analisis juga dapat dilihat dari unsur politik yang sedang dibangun dibalik pemberitaan Bupati Jember di media JTV Jember yaitu berita yang ditayangkan JTV Jember tentang Bupati Jember bertujuan untuk menyampaikan segala program Bupati Jember terhadap masyarakat Jember hal ini dipermudah dengan adanya media yang bersinergi dengan Pemkab Jember. Menurut salah satu pengamat media berita yang ditayangkan JTV Jember mengenai pemberitaan JTV Jember memiliki unsur pencitraan. Karena disetiap pemberitaan yang menyangkut Bupati Jember tidak pernah ditayangkan berita yang mengandung unsur negatif tentang Bupati, pemirsanya hanya diberikan tayangan sisi baik Bupati Jember dalam memimpin Jember.<sup>48</sup> Pernyataan pengamat media tersebut dapat dianalisis bahwa unsur pencitraan dari pemberitaan JTV Jember yang memuat tentang Bupati Jember menjadi hal biasa. Namun, hal tersebut juga diperjelas oleh pengamat media bahwa masyarakat saat ini lebih membandingkan informasi dengan fakta di lapangan. Selain unsur politik, pemberitaan JTV Jember yang menyangkut Bupati Jember juga dapat dianalisis melalui ideologi dalam pemberitaan tersebut. Ideologi yang diterapkan dalam pemberitaan tersebut JTV Jember berhati-hati dalam memberitakan Bupati Jember dan bahkan JTV Jember tidak menayangkan berita yang dapat merusak MOU sehingga pengambilan sudut pandang saat produksi berita diusahakan agar tidak merusak MOU dan mengemas berita secara baik sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Menurut salah satu pengamat media, pemberitaan yang dikendalikan dengan

---

<sup>47</sup> Observasi kantor Humas IAIN Jember (Pengamat Media) 14 Februari 2020

<sup>48</sup> Observasi kantor Fakultas Dakwah IAIN Jember (Pengamat Media) 15 Januari 2020

MOU adalah hal wajar karena kepentingan kekuasaan. Dari pernyataan tersebut dapat dianalisis bahwa media telah dibeli oleh penguasa yang memiliki kepentingan tertentu. Sehingga berita-berita yang mengandung unsur negatif tentang Bupati Jember tidak ditayangkan oleh JTV Jember menjadi hal wajar.<sup>49</sup> Pemberitaan Bupati Jember di media JTV Jember juga dapat dianalisis melalui budaya yaitu berita yang ditayangkan JTV Jember tentang Bupati Jember tidak dapat diukur besar kecilnya pengaruh berita tersebut terhadap masyarakat namun, hal ini dapat dilihat atau dianalisis pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember di tahun 2020. Pernyataan tersebut muncul karena kota Jember merupakan kota santri yang masyarakatnya masih mengikuti saran Kiyai.<sup>50</sup>

Temuan disajikan secara lengkap dan terkait dengan ruang lingkup penelitian yang ditentukan sebelumnya. Temuan dapat dilengkapi dengan tabel, grafik, dan / atau grafik. Tabel dan gambar diberi nomor dan judul. Hasil analisis data dijelaskan dengan benar dalam artikel. Bagian diskusi secara logis menjelaskan temuan, terkait dengan sumber yang relevan.

### **C. KESIMPULAN DAN SARAN**

Bentuk hegemoni Bupati Jember terhadap JTV Jember adalah adanya kebijakan redaksi JTV Jember yang memberikan batasan-batasan mengenai pemberitaan Bupati Jember. apabila berita Bupati bersifat negatif yang dapat merugikan salah satu pihak maka JTV Jember tidak menayangkan berita tersebut.

Faktor kemunculan hegemoni Bupati Jember dengan JTV Jember karena adanya tujuan-tujuan tertentu dari masing-masing pihak.

- a) Tujuan utama Pemkab Jember atau Bupati Jember bekerjasama dengan JTV Jember sebagai media yang dapat penetral berita negatif tentang Pemkab Jember.
- b) Tujuan utama dari JTV Jember setuju dengan MOU yang dijalin dengan Pemkab Jember karena adanya kepentingan ekonomi untuk lebih mensejahterakan karyawan JTV Jember.

Dari adanya faktor tersebut maka dapat disimpulkan bahwa setiap apapun peraturan yang diberikan Bupati dalam MOU tersebut, JTV Jember secara spontan

---

<sup>49</sup> Observasi kantor Fakultas Dakwah IAIN Jember (Pengamat Media) 15 Januari 2020

<sup>50</sup> Observasi kantor Fakultas Dakwah IAIN Jember (Pengamat Media) 15 Januari 2020

menyetujui. Sehingga hegemoni yang dilakukan Bupati Jember terhadap JTV Jember menjadi bentuk hegemoni yang integral atau total. Sehingga berita yang dihasilkan menjadi berita yang sesuai dengan keinginan Pemkab Jember.

#### **D. DAFTAR PUSTAKA**

- . Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. Tersedia di [kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis](http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis). Diakses 16 oktober 2019.
- Agung Manghayu & Andi Heny Mulawati Nurdin, Manajemen pemangku Kepentingan Dalam Ranah Pengambilan Keputusan Daerah, Desember 2018.
- Antonio Gramsci, Negara dan Hegemoni, Nezar Patria dan Andi Arief, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2003.
- Bajari, Anwar.2015. Metode Penelitian Komunikasi; Teori dan Praktik Komunikasi Kontemporer. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Dadang S Anshori, jurnal Hegemoni dan Dominasi Bahasa Pejabat Dalam Media Massa Pasca Orde Baru: Analisis Wacana Kritis Tentang Idiom Politik di Indonesia, April 2019. [scholar.google.co.id](http://scholar.google.co.id)
- Dan Nimmo, Komunikasi Politik Komunikator Pesan dan Media, Bandung: PT Rosda Karya 2011
- Elya Munfarida, Jurnal Analisis Wacana Kritis Dalam Prspektif Norman Fairlough, Yogyakarta 2014. [ejournal.iainpurwokerto.ac.id](http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id)
- Eriyanto, Analisis wacana Pengantar analisis Teks MediaI, Yogyakarta: LKIS 2012.
- George Ritzer, Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik sampai Peerkembangan Terakhir Postmodern, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012.
- Harsono Suwardi, Peranan Pers dalam Politik di Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993
- Heri Kusmanto, dkk, Pengantar Ilmu Politik, Medan: Pustaka Press, 2006,. IAIN Jember.2016. Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Pascasarjana.
- John W. Creswell, Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches California: SAGE Publications, Inc, 1994.
- Kun Wazis, Media Massa Dan Konstruksi Realitas, Yogyakarta: Aditya Media Publishing 2012

- Lexi. J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muh Hanif, *jurnal Study Media dan Budaya Populer Dalam Perspektif Modernisme dan Postmodernisme*, 2019. [ejournal.iainpurwokerto.ac.id](http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id)
- Nezar Patria dan Andi Arief, *Antonio Gramsci Negara dan Hegemoni*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003.
- Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Jakarta : Lkis, 2008.
- Pius A Partanto, M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (yogyakarta: Arkola 2001), 448.
- Roger Simon, *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan Insist, 1999.
- Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999. Siti Aminah, *Jurnal Politik Media, Media Politik dan Demokrasi*, 2019  
[www.jurnal.unair.ac.id](http://www.jurnal.unair.ac.id)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014. Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Syamsiyah Amali, *Jurnal Analisis Isi Berita Progam Kominfo Pada Surat kabar Daerah, Manado:2017*. [media.neliti.com](http://media.neliti.com)
- Syarif Budhiriyanto, Noneng Sumiaty, Syaidah, *Jurnal Analisis Wacana Media Terhadap Kebijakan dan Cintra Pemerintah di Surat Kabar Daerah Pada Tahun 2017*, Bandung:2018. [media.neliti.com](http://media.neliti.com)
- W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* NewYork: Pearson Education, 2003.  
[www.televi-si-dijember.com](http://www.televi-si-dijember.com) diakses pada 29 oktober 2019.